

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT DALAM JASA BONGKAR MUAT
(Studi Kasus Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013)**

Bayu Kurnia Sastra Wardhany

Abstrak

Dalam bidang ekonomi adanya persaingan usaha antara pelaku usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha, Namun tidak semua pelaku usaha berpikir seperti itu, masih ada yang berpikir untuk mendapatkan tujuannya itu menggunakan cara yang melawan hukum, Khususnya perusahaan yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan jasa bongkar muat. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum atas persaingan usaha tidak sehat dalam perusahaan jasa bongkar muat serta penyelesaian sengketanya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan teori Kepastian Hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan sumber utama adalah data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Cara penyelesaian sengketanya melalui KPPU dengan mekanisme laporan atau monitoring KPPU, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, mendengarkan keterangan sanksi/pelaku dan memeriksa alat bukti, memperpanjang pemeriksaan lanjutan, memberikan keputusan komisi, pemberitahuan keputusan, pelaksanaan keputusan, pelaporan pelaksanaan keputusan. Jika keberatan dengan putusan dapat mengajukan keberatan, Pengadilan Negeri memeriksa keberatan, Pengadilan Negeri memberikan putusan dan jika keberatan maka upaya hukum selanjutnya ialah banding ke Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung, permintaan penetapan eksekusi, penetapan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi ini diatur dalam bab VII Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akibat hukum dalam persaingan usaha tidak sehat dapat berupa Tindakan Administratif, Pokok Pidana dan Pidana Tambahan. Kewenangan KPPU memberikan sanksi diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan bentuk sanksi yang diberikan KPPU diatur pada bab VIII Pasal 47 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata kunci : Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

**JURIDICAL REVIEW OF UNFAIR BUSINESS COMPETITION
IN THE SERVICE STEVEDORE
(Case Study Commission's Decision Case Number 02/KPPU-I/2013)**

Bayu Kurnia Sastra Wardhany

Abstract

In the economic field for competition between businesses is a common thing. Fair business competition will be a boost for entrepreneurs, but not all businesses to think like that, there are those who think to get that goal in a manner that is against the law, Especially companies that perform unfair competition in the activities of loading and unloading services. Therefore in this study raised the issue of the legal consequences of unhealthy business competition in stevedoring services company and the settlement of disputes in accordance with Law No. 5 of 1999. To address these problems the author uses the theory of Rule of Law. This study uses normative juridical research with primary sources are secondary data.

The conclusion from this study is the way the settlement of disputes by the Commission and reporting mechanisms or monitoring the Commission, the preliminary examination, further investigation, hearing the testimony of sanctions / offenders and examine the evidence, extending further investigation, providing the commission's decision, notification of the decision, the implementation of the decisions, reporting the implementation of the decision , If an objection to the decision can be appealed against, the District Court examine the objection, the District Court gave judgment and, if objection then the remedy next step was to appeal to the Supreme Court, Supreme Court decisions, requests the establishment of execution, determination of execution and the execution is regulated in Article 38-46 of Law No. 5 of 1999. As a result of the law in unfair competition may be administrative actions, the Basic Criminal and Criminal Supplement. And the form of sanctions given the Commission set up in Article 47-49 of Law No. 5 of 1999.

Keywords: Unfair Competition, Business Competition Supervisory Commission, Law No. 5 of 1999